ISSN 2303- 0089
e-ISSN 2656-9949

DINAMIKA GOVERNANCE
JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index

KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS ATAU SUARA UNTUK PEMILU: KAJIAN LITERATUR DENGAN PENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS

Sintia Maria Rawis[*] [1],
[1] Universitas Sam Ratulangi
[*]Email Corresponding: sintiarawis@unsrat.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:
Received date: 27 Juni 2025
Revised date: 30 Juni 2025
Accepted date: 6 Juli 2025

ABSTRACT

The narrative of "free nutritious meals" has emerged as a flagship policy within the broader discourse of social welfare in Indonesia. This policy has gained significant public attention, particularly in the context of social justice and state responsibility. This study is a literature review utilizing the Critical Discourse Analysis (CDA) approach, drawing on the theoretical frameworks developed by Norman Fairclough and Teun A. van Dijk. The analysis focuses on the discourse construction of this policy by examining the role of political actors, media coverage, and relevant academic literature. The study finds that the narrative of "free nutritious meals" is not solely framed as a solution to nutritional and welfare issues, but also functions as a rhetorical instrument to construct a leadership image and garner political support. This discourse reveals a hidden power dynamic in which critical structural issues—such as economic inequality, food system sustainability, and public engagement—are often overlooked. The study highlights the importance of critically reading public policies, so they do not merely serve as tools of political legitimacy, but genuinely aim to promote social justice. It also recommends the need for increased critical awareness in evaluating policies, especially those claiming to be socially sustainable and justice-oriented.

***Keyword**: Critical Discourse Analysis, Public Policy, Free Nutritious Meals, Political Discourse and Social Justice*

ABSTRAKSI

Narasi “makan bergizi gratis”, sebuah kebijakan yang muncul sebagai salah satu program unggulan dalam narasi kesejahteraan sosial di Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu program strategis yang banyak mendapat sorotan baik publik, terutama dalam konteks kesejahteraan sosial. Studi ini merupakan salah satu studi literatur dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) yang berperan sebagai pendekatan dan teori yang dikembangkan Norman Fairclough dan Teun A. van Dijk. Dilakukan telaah terhadap distriburi aktor politik, pemberitaan media serta artikel ilmiah yang relevan untuk menelaah bagaimana wacana kebijakan tersebut dikonstruksi. Studi ini mengidentifikasi bahwa narasi “makan gratis” dalam pemaknaannya tidak hanya sebagai sebuah solusi berkaitan dengan gizi dan kesejahteraan, akan tetapi juga sebagai salah satu instrumen membangun citra kepemimpinan dan memperoleh dan meraih dukungan politik. Narasi “makan bergizi gratis”, menunjukkan adanya sebuah relasi kuasa tersembunyi, di mana isu struktural dan krusial seperti ketimpangan ekonomi, keberlanjutan pangan, dan partisipasi publik seringkali diabaikan. Studi ini menekankan pentingnya membaca kebijakan publik secara kritis, agar kebijakan tidak sekedar menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan sungguh-sungguh berpihak pada keadilan sosial. Studi ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan kewaspadaan kritis dalam menilai sebuah kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Kebijakan Publik, Makan Bergizi Gratis, Wacana Politik dan Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Kebijakan publik idealnya hadir sebagai sebuah bentuk tanggung jawab suatu negara dalam menjawab persoalan maupun kebutuhan serta tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya di bidang kesejahteraan sosial. Dalam kerangka negara kesejahteraan, program makan bergizi gratis secara normatif dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara, khususnya anak-anak (Esping-Andersen, 1990). Isu kesejahteraan sosial kemudian menjadi salah satu dari sekian agenda penting yang diutamakan dalam pembangunan nasional, karena berkaitan dengan konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling banyak disoroti masyarakat Indonesia saat ini.

Salah satu kebijakan menjadi sorotan belakangan ini adalah program "makan bergizi gratis" atau yang lebih dikenal dengan MBG. Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang awalnya sebagai wacana dalam pemilu dan yang saat ini telah dijalankan. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang diklaim sebagai langkah progresif pengentasan persoalan gizi buruk dan stunting, serta yang belakangan dipromosikan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan generasi penerus tapi juga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar. Bahkan kebijakan makan bergizi gratis yang kerap diklaim sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Pada beberapa negara, khususnya negara-negara yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tinggi, akses terhadap makanan sehat masih menjadi salah satu tantangan besar yang sangat mempengaruhi terutama bagi masyarakat yang tergolong kelompok rentan seperti masyarakat dengan penghasilan rendah, anak-anak, maupun lansia. Masalah kekurangan akses terhadap jumlah pangan yang cukup sangat diperlukan. (Costlow et al, 2024). Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan pemberian makanan bergizi gratis sebagai strategi mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan dalam hal peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Program-program yang dibuat pun seperti pemberian makanan gratis di sekolah, subsidi pangan, dan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin.

Program Makan Gratis sejatinya telah muncul sejak Juli 2006. Prabowo yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktu itu membicarakan tentang permasalahan stunting yang tak kunjung bersolusi. Dan data yang di peroleh terdapat 30% anak-anak di Indonesia yang berumur dibawah 5 tahun mengalami masalah stunting karena kekurangan gizi (Hidayatullah, 2024).

Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 menjadikan makan begizi gratis sebagai salah satu program prioritas. Dalam masa kampanye, Prabowo mengklaim program makan bergizi gratis tersebut akan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Ia juga memandang makan bergizi gratis akan menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk perbaikan kondisi sumber daya manusia di Indonesia.

Setelah terpilih jadi presiden Indonesia, Prabowo mengatakan program unggulannya dapat meningkatkan peredaran uang di desa-desa menjadi Rp 8 miliar. Makan Bergizi Gratis bakal segera diimplementasikan pada 2025 (Fajri. Islamiati 2024). Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Program Makan Bergizi Gratis pertama kali diujicoba pada Februari 2024 atau sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan kemenangan Prabowo-Gibran. Dilakukan simulasi bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang. (Fajri. Islamiati 2024). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diluncurkan sebagai respons terhadap tantangan gizi yang signifikan, seperti stunting dan malnutrisi pada anak-anak. (Waluyo, S. D. (2025). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hal ini sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).

Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan konteks politik elektoral dan momentum pemilihan umum. Dalam praktik politik elektoral, kebijakan makan bergizi gratis ini sering dibingkai sedemikian rupa sehingga bukan hanya menjadi cerminan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi elektabilitas pada pemilu. Tapijuga sering diposisikan sebagai solusi konkret atas masalah ketimpangan gizi dan Pendidikan. Akan tetapi, di balik retorika kebijakan yang tampak pro-rakyat tersebut, terdapat dinamika politik yang patut dicermati. Wacana "pro-rakyat" yang digaungkan

dan melekat pada kebijakan tersebut sering kali digunakan untuk memreproduksi citra politik yang menguntungkan aktor-aktor tertentu. Seperti yang dikemukakan Fairclough (1995), bahasa dan wacana dalam kebijakan tidak netral; ia merupakan medium di mana ideologi dan kekuasaan dinegosiasikan.

Visi keadilan sosial dalam Pancasila adalah keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Keseimbangan antara fungsi manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, visi keadilan sosial pada sila kelima Pancasila harus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Asmaroini, 2017). Melalui sistem yang humanis, diharapkan program MBG dapat merealisasikan visi keadilan dalam sila kelima Pancasila. Program MBG yang digagas pemerintah adalah program dengan tujuan mulia, sejalan dengan semangat sila lima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pemerintah berupaya agar kebutuhan gizisecara adil dipenuhi bagi semua siswa, dari daerah terpencil seperti wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hingga kota-kota besar tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Setiap siswa berhak sama untuk menikmati makanan yang bergizi. Tindakan pemerintah itu mencerminkan keadilan sosial yang seimbang karena seluruh siswa diperlakukan dengan cara yang sama dan setara demi mencapai kesejahteraan bersama.

Waluyo (2025) melakukan studi terhadap Kebijakan Makanan Bergizi Gratis. Dalam studi tersebut dituliskan dalam implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan. Salah satunya tantangannya adalah memastikan bahwa tidak ada pembebanan terhadap anggaran negara secara berlebihan yang kemudian terjadi ketidakstabilan akibat program ini. Melihat adanya pengalaman dari negara lain misalny India yang menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku lokal yang tersedia secara musiman dapat membantu menekan biaya program.

Maharani et al. (2024) membahas bahwa program yang makan bergizi gratis yang digagas Prabowo-Gibran yang pada waktu itu sebagai pasangan calon preseiden dan wakil presiden. Program ini merupakan Langkah yang progresif yang dapat memproduksi kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dampak yang diharapkan ialah menurunnya tingkat kelaparan, khususnya bagi para pelajar dan balita. Program MBG juga diharapkan dapat memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang berakibat kepada meningkatnya kesehatan dan kinerja akademis mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu Langkah proaktif dalam mengatasi perihal kelaparan khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis akan berfokus pada analisis wacana kritis bagaimana konstruksi yang terbentuk dari kebijakan makan bergizi gratis yang hingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah sesungguhnya kebijakan tersebut merupakan sebuah solusi berkaitan dengan gizi dan kesejahteraan, ataukah menjadi sebuah relasi kuasa tersembunyi juga sebagai salah satu instrumen membangun citra kepemimpinan dan memperoleh dan meraih dukungan politik yang dikemas pada media massa.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis dan mengupas bagaimana kebijakan makan bergizi gratis tersebut dipresentasikan secara normatif dan ideal, tetapi juga untuk menyoroti aspek-aspek terkandung didalamnya bahkan dibalik itu, termasuk bagaimana wacana tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kritis mengenai hubungan antara kebijakan publik, narasi dan politik.

METODE

Landasan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini berpusat pada perhatian pada prinsip-prinsip umum dan perwujudan sebuah makna yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat (Burhan Bungin, 2007: 23). Penyajiannya dalam bentuk deskriptif yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisa, serta menyajikan data dan informasi yang sebenar-benarnya yang diperoleh dari media massa, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan dari objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis oleh Norman Fairclough sebagai metode atau pisau analisis yang dilakukan pada lireture-literature di media massa. Analisis Wacana Kritis merupakan salah satu paradigma kritis yang mencoba memandang realitas salah satunya media bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan dari berbagai media dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Analisis wacana kritis memungkinkan analisa berlangsung secara mikro dilakukan terhadap teks-teks yang diproduksi media, memahami pesan yang dimunculkan oleh media, kemudian memahami konstruksi yang hendak direproduksi dan dibangun oleh pembuat media tersebut. Penelitian yang dilakukan atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks

semata, tapi juga harus dilihat bagaimana teks itu diproduksi sehingga memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks dapat berbentuk semacam itu. Suatu jembatan yang menjadi penghubung antar elemen berupa struktur sosial dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Pada satu sisi, kognisi sosial tersebut menunjukkan proses teks diproduksi oleh media, di sisi lain nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserab khalayak luas (Van Dijk, 2015).

Objek analisis wacana kritis sebagai konsekuensi atas posisi teoritisnya yang bebas nilai sehingga CDA sering berfokus pada tema-tema tentang beroperasinya kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan sosial. Analisis wacana kritis mensyaratkan analisis dan pemahaman secara rinci apakah kekuasaan itu, jenis kekuasaan apa saja yang terlibat, dan bagaimana kekuasaan itu terjadi, diproduksi dan diekspresikan dalam media massa. Unsur yang terkandung dimedia baik itu unsur naratif yang berhubungan dengan tema, aspek rangkaian peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan merupakan kesatuan yang mempengaruhi dan membentuk satu pesan yang tersampaikan yang kemudian berkembang menghegemoni.

Analis wacana kritis Nourman Fairclough berusa menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks/bahasa pemberitaan wacana kebijakan makan bergizi gratis (MBG) sampai pada pelaksanaannya diberbagai media, baik elektronik maupun online. Subjek di studi ini adalah berita-berita tentang makan bergizi gratis (MBG) yang awalnya sebagai wacana dalam pemilu dan yang saat ini telah dijalankan di media elektronik dan online, redaktur pelaksana atau kepala desk, jurnalis penulis, respon pembaca tentang kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak dasar warga negara, khususnya anak-anak usia sekolah, dalam memperoleh akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Program ini secara normatif ditujukan untuk mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan di kalangan masyarakat miskin. Dalam perspektif pembangunan sosial, penyediaan makanan bergizi di institusi pendidikan dianggap sebagai bentuk nyata dari intervensi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (World Bank, 2021).

Menurut Grindle (2004), kebijakan publik yang efektif tidak hanya harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga feasible dalam hal pelaksanaan. Dengan demikian, keberhasilan program makan bergizi gratis sangat bergantung pada konsistensi anggaran, infrastruktur logistik, kualitas penyedia layanan, serta pengawasan lintas sektor yang terkoordinasi.

Kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan salah satunya oleh Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Visi keadilan social menurut Pancasila adalah kesetaraan antara terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Namun media dan masyarakat diriuhkan tentang kebijakan makan bergizi gratis ternyata tidaklah luput dari perhatian banyaknya lapisan masyarakat. Dinamika yang berkembang di masyarakat mengenai janji Presiden Prabowo dalam kampanye menjadi pembahasan internal. Langkah Presiden Prabowo yang merealisasikan Kembali program itu pun menuai kritik. Berbagai media televisi, media cetak maupun media online ramai memberitakan kebijakan ini. Adanya pro tapi banyak pula yang kontrak atas kebiajkan ini. Bahkan banyak berita di media yang menguak kegagalan kebijakan yang dilakukan ini mulai dari pengeluhan siswa, anggapan bahwa kebijakan ini semata hanya sebagai janji ketika pemilu akan tetapi dalam realisasinya tidak adil dan merata serta keluahan-keluhan lainnya. Dalam highlight "Kebijakan Makan Bergizi Gratis" ditampilkan banyak berita yang berasal dari media, Metro TV, TVR Parlemen, Kompas TV, CNBC Indonesia, CNN News, Sctv. Respon pembaca memperlihatkan bahwa banyak yang mengecam bahkan mengeluh dengan kebijakan ini.

Tabel 1 Data Judul Pemberitaan Makan Bergizi Gratis

Sumber Media	Data	Judul Berita
Metro TV	(1)	PANAS! Ganjar & Prabowo, Internet Gratis vs Makan Gratis
Metro tv	(2)	Prabowo Ganti Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis
TVR Parlemen	(3)	Kabar Nusantara |Menilik Program Makan Bergizi Gratis
Kompas TV	(4)	BGN Sebut Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Anggaran Rp100 T untuk 82,9 Juta Penerima Manfaat
Kompas TV	(5)	Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di 26 Provinsi, Ini Kata Jubir Kantor Kepresidenan
CNBC Indonesia	(6)	Viral Banyak Mitra MBG Yang Mundur, Badan Gizi Negara Buka Suara
Kompas TV	(7)	Tak Dibayar Hampir Rp1 Miliar, Dapur Makan Bergizi Gratis Berhenti Beroperasi
Kompas TV	(8)	Ragam Komentar Siswa usai Jajal Menu Makan Bergizi Gratis - PARASOT
SCTV	(9)	Siswa SD di Palembang Kritik Menu Makan Bergizi Gratis, Rasanya Hambar
Kompas TV	(10)	Kritik Pengelolaan Makan Bergizi Gratis, DPR: Ada Ulat hingga Nasi Keras
CNBC Indonesia	(11)	Catatan Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
CNN Indonesia	(12)	Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis

1. Analisis Teks (Mikro)

Pada data (1) diawali dengan awal mula Prabowo yang kini menjadi Presiden Indonesia menawarkan program Makan Siang Gratis sebagai salah satu program ungggulan sebagai tandingan program Internet Gratis yang di gagas lawannya calon Presiden Ganjar saat debat Capres di Pilpres 2024. Makan siang gratis awalnya digagas untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia bagi masyarakat yang tergolong kelompok rentan seperti masyarakat dengan penghasilan rendah, terlebih anak-anak. Masalah kekurangan akses terhadap jumlah pangan menjadi hal yang disoroti disini. Dalam debat tersebut, Prabowo mengklaim bahwa program ini akan dapat membantu perekonomian terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu. Ia juga memandang makan gratis lebih penting daripada internet gratis terlebih untuk masyarakat susah, masyarakat miskin dan masyarakat kalangan bawah. Karena makanan adalah mutlak untuk rakyat.

Di data (2) Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara khusus di salah satu televisi nasional, mengatakan mengoreksi dan mengganti naman program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Akan tetapi pergantian nama tidak merubah tujuan utama dari kebijakan ini. Menurutnya, istilah yang tepat digunakan adalah makan bergizi gratis oleh karena ketika siang hari anak sekolah Indonesia sudah pulang jadi, makan gratis akan dibagikan dipagi hari.

Di data (3) dan (5) kebijakan makan Gratis resmi di pada 6 Januari 2025 yang. Peluncuran perdana dilakukan di 190 titik yang tersebar di 26 Provinsi kemudian akan di alokasikan ke provinsi yang lain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh penerima manfaat akan mendapatkan makan bergizi gratis pada akhir 2025, diantaranya para siswa/i dari PAUD hingga SMA, balita, dan ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi. Hingga saat ini, program MBG telah melayani 650 ribu anak di 31 provinsi di Indonesia.

Berbeda dengan data (4) 21 hari setelah peluncuran makanan bergizi gratis, pemerintah mengevaluasi kebijakan ini karena masih kurangnya anggaran sehingga masih banyak anak yang belum mendapatkan manfaat makan bergizi gratis. Presiden minta agar penerima manfaat makan bergizi gratis pada bulan Agustus sudah mencapai 6 juta orang. Pemerintah berencana menambah anggaran MBG sebesar Rp100 triliun. Semula, anggaran program MBG disepakati Rp71 triliun untuk 15 hingga 17,5 juta penerima. Namun dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo Subianto optimistis program prioritas yang diusung pemerintahannya akan berhasil. Prabowo juga meminta maaf kepada orang tua dan murid yang belum mendapat program makan bergizi gratis. Untuk makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang target awal tahun 2025, ada 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG dengan jumlah anggaran Rp71 triliun. Namun menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Untuk itu diperkirakan butuh tambahan anggaran mencapai Rp100 triliun agar bisa

mencapai 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Dengan program makan bergizi gratis, pemerintah berharap bisa ikut berperan serta dalam meningkatkan kemampuan akademis anak-anak Indonesia.

Di data (6), (7), (8), (9), (10) kritik mulai mewarnai kebijakan ini. Para siswa yang telah mencoba menu masakan di program makan bergizi gratis pun memberikan ragam komentar. Ada yang menyukai karena gartis, tapia da pula komentar lain. Mulai dari rasa makanan yang hambar, tapijuga beberapa siswa mengatakan asin dan ada makanan yang asam. Beberapa anak tidak suka sayur hingga menu makanan yang tidak disukai sehingga membuat anak-anak lebih memilih untuk membeli makanan di kantin. Hingga ditemukan kasus di mana buah yang dibagikan kepada siswa dalam program MBG ternyata mengandung ulat, hingga nasi yang disajikan sudah keras. Salah satu masalah yang terjadi adalah banyak Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mundur karena tidak di bayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satunya yang terjadi si bulan ke 3 kebijakan ini, Mitra Kawasan Kalibata, Pancoran Jakarta Pusat mengalami kerugian hampir Rp1 Miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN. Pihak mitra akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. engusaha penyedia makan bergizi gratis, MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya, program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Pengusaha penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara, selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah dengan kuota 3.500 pax. Pembayaran seharusnya terbagi dalam dua tahap. Namun hingga hari ini, pembayaran tak kunjung dilakukan sekalipun. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir Rp1miliar untuk penyiapan tempat dan sajian MBG.

Data (11), (12) berisi evaluasi tentang kebijakan makan bergizi gratis seiring berjalannya waktu hingga saat ini. Sejumlah permasalahan dalam implementasi program makan bergizi gratis mulai terjadi di beberapa daerah. Mulai dari keterlambatan hingga adanya kasus keracunan pada siswa penerima manfaat. Kontrol yang ketat perlu di perhatikan, tidak hanya dari segi kualitas menu, tapijuga dalam hal kebersihan dan rasa. Perlu adanya pengawalan antara beberapa pihak baik dari BGN maupun pihak catering, dan guru-guru disekolah untuk melakukan control terhadap realisasi kebijakan ini, mengingat sensitifnya perihal ini.

2. Dilema Kesejahteraan dan Realitas Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Keadilan Sosial

Pancasila adalah fondasi negara yang tidak hanya digunakan sebagai prinsip dalam pemerintahan, tetapi juga dianggap sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki penerapan dan dampak yang luas bagi rakyat. Para pengambil keputusan harus mengikuti Pancasila dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik. Dinamika munculnya suatu kebijakan dapat diamati sejak terbentuknya Indonesia hingga kini. Masalah-masalah yang sangat rumit dalam beragama memunculkan kebutuhan akan kebijakan sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan tersebut tanpa menimbulkan isu baru, sehingga kehadiran Pancasila adalah sebagai kontribusi untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Konsep tersebut menekankan bahwa kesejahteraan adalah elemen yang sangat luas, tidak hanya mencakup aspek sosial tetapi juga aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mereduksi ketimpangan sosial ekonomi melalui program dan kebijakan yang diimplementasikannya.

Dalam kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berkomitmen untuk melaksanakan program makan siang gratis sebagai salah satu prioritas, yang bertujuan mengurangi angka stunting di Indonesia. Dengan tekad yang kuat, pasangan ini menegaskan bahwa program itu bukan hanya sekadar janji dan akan dilaksanakan jika mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden pada periode 2024-2029, program tersebut akan mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Program ini menyoroti kesadaran mengenai signifikansi akses yang merata terhadap kesejahteraan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Konsep negara kesejahteraan menekankan pentingnya peran signifikan pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam menawarkan program-program kesejahteraan, menjamin tercapainya keadilan sosial, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Analisis mendalam terhadap kebijakan makan bergizi gratis tidak dapat dilepaskan dari penelusuran motivasi para aktor politik yang menginisiasinya. Dari perspektif teori pilihan rasional, setiap keputusan politik, termasuk pengguliran program kesejahteraan, merupakan kalkulasi strategis. Kandidat atau partai politik cenderung mengadopsi kebijakan yang dipandang dapat memaksimalkan dukungan pemilih. Dalam konteks ini, makan bergizi gratis menawarkan daya tarik ganda:

Pertama, dampak kesejahteraan yang nyata dan terukur. Krisis gizi, khususnya *stunting* pada anak, merupakan masalah fundamental yang dampaknya terasa hingga lintas generasi. Kebijakan makan bergizi gratis secara langsung menyasar persoalan ini, menjanjikan perbaikan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Narasi ini sangat kuat untuk menyentuh hati nurani pemilih yang peduli terhadap masa depan bangsa.

Kedua, visibilitas dan efek Langsung: Tidak seperti kebijakan struktural yang membutuhkan waktu panjang untuk terlihat hasilnya, program makan gratis memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Sensasi "diberi" ini menciptakan ikatan psikologis dan rasa terima kasih yang potensial dikonversi menjadi dukungan suara. Distribusi makanan yang terorganisir juga memberikan visibilitas tinggi bagi pihak yang menginisiasi kebijakan, berfungsi sebagai *branding* politik yang efektif.

Memahami usaha mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial dalam konteks inimemerlukan diskusi untuk menjelaskan topik tersebut. Politik muncul dengan menegaskan bahwa negara merupakan pemain utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan berjalannya waktu, persoalan kesejahteraan sosial ini menjadi fokus utama bagi pemerintah. Perkara-perkara kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan atau program pemerintah. Negara Indonesia yang beragam memerlukan berbagai alat teoritis untuk perumusan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial serta politik (Pradana, 2020). Terlihat bahwa program MBG adalah salah satu inisiatif dalam memodernisasi sistem pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal itu dipandang sebagai penerapan kebijakan pemerintah yang terinspirasi oleh beberapa negara maju lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Penyusunan kebijakan yang optimal sebaiknya didasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam, data empiris yang solid, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada kebijakan penyediaan makanan bergizi tanpa biaya, penanganan stunting dan masalah gizi di Indonesia menjadi alasan kuat dari perspektif teknokratis. Tingginya angka stunting merupakan sinyal sosial yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Dari sudut pandang ini, program makan sehat gratis dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia, yang akan memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan negara di masa depan.

Akan tetapi, dinamika dalam penyusunan kebijakan di sektor politik sering kali tidak sepenuhnya mengikuti garis lurus. Dalam konteks pemilihan umum, kebijakan seperti penyediaan makanan bergizi tanpa biaya dapat dikategorikan sebagai kebijakan populis. Ini tidak berarti populisme selalu buruk, tetapi harus diwaspadai jika penyusunan kebijakan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pemilihan umum daripada analisis mendalam mengenai kelayakan, keberlanjutan, dan efektivitas. Kemunculan janji ini sebagai tanggapan terhadap janji "internet gratis" dari kandidat lainnya, misalnya, menunjukkan adanya aspek persaingan politik dalam proses penyusunan. Pertanyaan kunci yang penting adalah: sejauh mana rencana program ini didasari oleh estimasi anggaran yang realistis, pola distribusi yang efektif, dan jaminan kualitas gizi yang dapat diukur, bukan hanya sekedar daya tarik verbal untuk mendapatkan dukungan.

Berdasarkan pada konsep kesejahteraan, makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang sangat baik dalam mendukung masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan program MBG tidaklah sederhana. Perlu dilakukan perencanaan yang cermat agar program tersebut mengenai sasaran dengan akurat. Selain itu, perlu dipastikan bahwa program tersebut tidak hanya berorientasi pada memberi makan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak secara keseluruhan dan jangka panjang. Program makan bergizi gratis belum memfokuskan perhatian pada wilayah-wilayah tertinggal yang memiliki kasus kekurangan gizi yang lebih tinggi. Saat ini distribusi penanganan kasus stunting masih belum merata karena ada wilayah yang memiliki angka kekurangan gizi lebih tinggi (Cisdi, 2024).

Dari data pemberitaan media mengenai kebijakan makan bergizi gratis ini, teks yang diproduksi dari setiap pemberitaan media menekankan bahwa ebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kampanye Pilpres 2024, sebenarnya adalah bagian dari strategi populisme kesejahteraan yang menekankan simbol kepedulian terhadap masyarakat kecil, terutama anak-anak dan kelompok yang rentan. Pernyataan tentang

kebijakan ini pertama kali muncul sebagai reaksi penanggulangan terhadap program Internet Gratis dari kandidat lain, dengan menekankan bahwa akses terhadap makanan bergizi lebih esensial dibandingkan dengan konektivitas digital, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan itu mengalami perubahan istilah dari "makan siang gratis" menjadi "makanan bergizi gratis", dengan alasan teknis dan semantik, tanpa mengubah inti dari tujuan program tersebut, yaitu pengentasan stunting, peningkatan kualitas gizi, dan pemerataan akses pangan. Pelaksanaan awal program ini dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat.

Namun, dari data yang di analisis, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program MBG menemui berbagai hambatan, di antaranya: Pertama, masalah anggaran, yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman makanan dan akses manfaat yang belum merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kedua, Kualitas makanan, yang mendapat kritik dari siswa karena rasa yang tidak stabil, menu yang kurang disukai, serta penemuan makanan yang basi atau tidak layak untuk dimakan. Dan ketiga, Manajemen dan pengelolaan yang terpengaruh oleh keterlambatan pembayaran kepada mitra penyedia makanan, bahkan mengakibatkan beberapa mitra mengalami kerugian signifikan dan memilih untuk mengundurkan diri dari kerja sama. Kasus dugaan penyelewengan dana juga terungkap, menunjukkan rendahnya pengawasan dan akuntabilitas dari lembaga yang menjalankan.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara narasi yang dibangun dalam kampanye dan kenyataan di lapangan. Program makan bergizi gratis yang seharusnya berfungsi sebagai kebijakan strategis untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan, justru bisa berisiko menjadi komoditas politik elektoral yang belum siap dalam aspek desain kebijakan, pelaksanaan teknis, dan keberlanjutan anggaran.

Memahami usaha mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial dalam konteks inimemerlukan diskusi untuk menjelaskan topik tersebut. Politik muncul dengan menegaskan bahwa negara merupakan pemain utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan berjalannya waktu, persoalan kesejahteraan sosial ini menjadi fokus utama bagi pemerintah. Perkara-perkara kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan atau program pemerintah. Negara Indonesia yang beragam memerlukan berbagai alat teoritis untuk perumusan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial serta politik (Pradana, 2020). Terlihat bahwa program MBG adalah salah satu inisiatif dalam memodernisasi sistem pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal itu dipandang sebagai penerapan kebijakan pemerintah yang terinspirasi oleh beberapa negara maju lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Pancasila secara fundamental menopang cita-cita kesejahteraan sosial yang menyeluruh, melampaui dimensi materiil hingga ke aspek moral dan spiritual. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang bertujuan mereduksi ketimpangan serta memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, merupakan salah satu inisiatif yang sejalan dengan semangat kesejahteraan negara, dengan fokus pada pengentasan *stunting* dan peningkatan kualitas gizi anak-anak tapi juga keadilan sosial. Janji ini, yang akan mulai direalisasikan pada awal 2025, mencerminkan kesadaran akan pentingnya akses pangan merata, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah, dan dipandang sebagai modernisasi sistem kesejahteraan sosial yang terinspirasi dari negara maju.

Namun, di balik narasi ambisius dan tujuan mulia tersebut, analisis terhadap implementasi awal program makan bergizi gratis di lapangan menunjukkan adanya disparitas signifikan antara janji kampanye dan realitas pelaksanaan. Meskipun digadang-gadang sebagai strategi populisme kesejahteraan dan keadilan yang menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan, program ini menghadapi berbagai hambatan serius. Berdasarkan metode analisis wacana kritis yang dipakai melihat pemberitaan media mengenai kebijakan ini, ditemukan tantangan utama meliputi masalah anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang sering dikeluhkan tidak sesuai standar atau bahkan basi, serta manajemen dan pengelolaan yang buruk, terbukti dari keterlambatan pembayaran mitra hingga dugaan penyelewengan dana.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program MBG, yang seharusnya menjadi instrumen strategis untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan, berisiko tinggi berubah menjadi komoditas politik elektoral. Kesiapan dalam aspek desain kebijakan,

perencanaan teknis, dan keberlanjutan anggaran masih dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk secara serius mengatasi berbagai hambatan ini, memastikan bahwa program MBG benar-benar berorientasi pada tujuan kesejahteraan yang sejati sesuai amanat Pancasila, bukan hanya sekadar sarana untuk mendulang popularitas politik. Tanpa perbaikan fundamental, tujuan mulia pengentasan stunting dan pemerataan gizi akan sulit tercapai, dan program ini berisiko menjadi beban finansial serta mengecewakan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2024). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, *3*(1), 370-383.

Ayuni, D. T. (2025). Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *8*(8), 21-30.

Bugin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana.

Cisdi. (2024). "Makan Bergizi Gratis: Menilik Tujuan, Anggaran dan Tata Kelola Program". Policy Paper Series: Mengkaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis. 1-16. Cisdi (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives).

Costlow, J., et al. (2024). Global Disparities in Food Access and Nutrition: A Comprehensive Review. arXiv preprint. Diakses melalui: https://arxiv.org/abs/2401.01080.

Curran J, G. M. (1996). *Mass Media and Society.* London: Arnold.

Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, *20*(2), 281-308.

Eriyanto. (2014). Analisis Naratif: Dasar-dasar dan penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media. . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.

Fajri, Islamiati. (2024). Makan Bergizi Gratis, Janji Kampanye Prabowo yang Mau Dijalankan di 2025. Diakses dalam https://kumparan.com/kumparanbisnis/makan-bergizi-gratis-janji-kampanye-prabowo-yang-mau-dijalankan-di-2025-24CS5wxmYy1

Grindle, M. (2004). *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*. Governance, 17(4), 525–548.

Hidayatullah, M. R. (2024). "Adik Prabowo Ungkap Asal-usul Ide Makan Bergizi Gratis, Tercetus Sejak 2006". (D. R. Meilanova, Ed.) Bisnis.com. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20241007/12/1805463/adik-prabowo-ungkap-asal-usul-ide-makan-bergizi-gratis-tercetus-sejak-2006

Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 1969-1976.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024. Diakses melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial–Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 101-112.

Pangaribuan, K. A., Nahriva, A. Z., Emri, Z. P., Simanjuntak, C. Z., & Sakti, M. (2025). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo-Gibran Dan Realisasinya. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *9*(7), 1-10.

Pradana, R. A. (2020). Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *3*(2), 87-101.

Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu*

Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, 767-780.

Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian journal of intellectual publication*, *5*(2), 130-137.

Schiffrin Deborah, D. T. (2015). *The Handbook of Discourse Analysis.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Subiakto, H. d. (2012). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. *The handbook of discourse analysis*, 466-485.

Vanti, M. E. D., Octaviani, V., & Maryaningsih, M. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Makan Gratis Prabowo Subianto Di Media Online. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, *11*(1), 427-436.

Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *12*(1), 144-151.

World Bank. (2021). *School Feeding Programs: Looking Ahead After COVID-19*. World Bank Brief.

Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2025, June). Politik Di Balik Piring: Analisis Literatur Atas Kebijakan Makan Bergizi Gratis. In *Seminar Nasional Pemerintahan dan Desa* (Vol. 1, No. 1).